

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. KSP sama sekali berbeda dengan LKM berbadan hukum koperasi. KSP adalah lembaga pada rumpun koperasi yang tunduk pada UU 25/1992 dan aturan turunan dalam lingkup kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan LKM berbadan hukum koperasi merupakan lembaga intermediasi dengan bentuk koperasi jasa sebagai perluasan dari ketentuan UU 10/1998. LKM diatur dalam UU 1/2013 agar dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan izin usaha dari OJK, bukan izin usaha sebagai bank. Sayangnya, meskipun LKM mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan, belum ada instrumen penjamin simpanan bagi LKM. Sebagai perbandingan, Bangladesh dan Jepang telah memiliki lembaga penjamin simpanan yang lingkup penjaminannya meliputi simpanan nasabah perbankan dan simpanan masyarakat di lembaga keuangan non-bank.
2. LKM berbadan hukum koperasi memiliki karakteristik badan hukum yaitu pertanggungjawaban terbatas. Ketiadaan LPS-LKM menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat penyimpan sebab mekanisme penyelesaian kewajiban pasca pencabutan izin usaha oleh OJK diserahkan kembali kepada pemegang saham atau anggota LKM yang notabene terbatas pada modal di dalam LKM. Lebih lanjut, pembentukan LPS-LKM tidak kunjung direalisasikan oleh otoritas. Sejak awal pembahasan UU 1/2013, Pemerintah Pusat gamang untuk mendesain LPS-LKM sebagaimana LPS-Perbankan. Oleh sebab itu, pembentukan LPS-LKM yang sempat diisukan pada 2015 akan dibuat di tingkat Provinsi sehingga Pemerintah Pusat tidak perlu mengambil andil yang besar. Akan tetapi, pembentukan LPS-LKM secara

sektoral dapat memicu beberapa konflik hukum seperti ketidakpastian, kecemburuan, dan batasan pengaturan pidana di tingkat daerah.

3. Pembahasan tentang LPS-LKM pasca 9 tahun diberlakukannya UU 1/2013 perlu dibawa kembali ke permukaan. Landasan mengapa LPS-LKM perlu dibentuk diantaranya:

- a. Wujud keadilan ekonomi bagi sesama masyarakat yang mempercayakan dana kepada lembaga intermediasi.
- b. Dukungan terhadap LKM yang menjangkau masyarakat *unbanked* atau ekonomi bawah untuk memberdayakan dan menjembatani proses masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.
- c. Kepastian hukum bagi LKM dan masyarakat penyimpan dalam dinamika bisnis keuangan serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKM.

V.2 Saran

1. Pemangku kepentingan baik OJK, Pemerintah Pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dan Pemerintah Daerah perlu melaksanakan dan menguatkan sosialisasi untuk menyampaikan informasi yang komprehensif terkait LKM dan KSP sehingga diperoleh pemahaman di masyarakat terkait kelembagaan LKM berbadan hukum koperasi dan KSP.
2. Pemangku kepentingan perlu segera mengkoordinasikan pembentukan LPS-LKM sebagai amanat UU 1/2013. Desain kelembagaan LPS-LKM dapat mempertimbangkan desain LPS-Perbankan mengingat keduanya sama-sama bergerak di bisnis uang. Selain itu, pemangku kepentingan juga dapat merujuk pada praktik baik penyelenggaraan LPS yang telah dilakukan oleh negara lain.

3. Penyusunan elemen norma dalam produk hukum landasan LPS-LKM dapat diupayakan sesuai dengan karakteristik LKM sekaligus tetap pada koridor akuntabilitas LPS-LKM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akyuwen, Roberto, *Mengenal Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI, 2016.
- Astanti, Dhian Indah, Tundjung Herning dan Dian Septiandani, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Nasabah*, Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Fakultas Hukum, Universitas Semarang: Laporan Penelitian, 2013. Diakses pada 29 Mei 2022, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T-0Phd4BBQ8J:https://repository.usm.ac.id/files/research/A009/20201007090645-Aspek-Hukum-Lembaga-Penjamin-Simpanan-Terhadap-Perlindungan-Nasabah.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Amal, Muhammad Ridha Haykal. *Hukum Koperasi dan UKM*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2021
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015. Diakses pada 17 Mei 2022, https://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan_na_ruu_ttg_perkoperasi.pdf
- Baswir, Revrisond. *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013
- Theresia Anita Chistiani dan Chryssantus Kastowo. *Undang-Undang PPKSK dalam Perspektif Tugas & Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020
- Darmawan, Akhmad dan Totok Haryanto. *Koperasi: Perkembangan dan Perspektifnya dalam Islam*, Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020
- Djojohadikoesomo, Marjono. disalin oleh H.B. Jassin, *Sepoeloeh tahoen Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah 1930-1940*, Batavia: Balai Poestaka, 1941
- Erwin, Muhamad dan Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016
- Fardiansyah, Tedy. *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Hairul. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish, 2020

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES Indonesia, 1993
- Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Napitupulu, Diani Ria Winanti. *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010
- Nurdin, Bahri. *Pengantar Koperasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok, 1979
- Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Santoso, Ivan Rahmat. *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Pemberdayaan Sektor Rill Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021
- Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2015
- Syarifin, Pipin dan Daebah Jubaedah. *Hukum Dagang di Indonesia* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun

2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Pengelolaan Aset

Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Keuangan Mikro

Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran

Keputusan Presiden No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013. *Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Ps. 1 ayat (1), Ps. 37 ayat (1) huruf f, Ps 50 ayat (1) huruf a, Ps. 50 ayat (2) huruf a dan, Ps. 55 ayat (1), Ps. 56 ayat (1), Ps. 57 ayat (2), Ps. 66-77, Ps. 80, Ps. 82-84.* Pemohon: Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur dkk. 28 Mei 2014.

JURNAL

Arifin, Agus, Lilik Purwanti, dan Yeney Widya O, “Menyingkap Rahasia di Balik Runtuhnya Lembaga Keuangan Mikro ‘Bertopeng’ Syariah” *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 6 No. 2* (2018):136-155

Danaparamita, Bella Bretyaning, “Penjaminan Dana Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol. 3 No. 2* (2019): 1-20. Diakses pada 30 Mei 2022, doi: 10.25139/lex.v3i2.2189

Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, “Pemisahan Kekayaan Perseroan Terbatas Dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Redaksi” *Ensiklopedia Social Reviw, Vol. 1 No. 1* (Februari 2019):50-51. Doi: 10.33559/esr.v1i1.220

Itnam, Shohibul, “Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis” *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1* (2021):179-198. Doi: 10.21043/equilibrium.v9i1.10012

Jayadi Hendri dan Huala Adolf, “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4 No. 2*, (Agustus 2018):66-88. Doi: 10.23887/jkh.v4i2.15444

Mamuaja, Juanda, “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan di Indonesia” *Jurnal Lex Provatum Vol. III No. 1* (Januari-Maret 2015): 38-48. Diakses pada 30 Mei 2022.

Mushafi dan Ismail Marzuki, “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum” *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.9 No. 1* (Juni 2018):50-58. Doi: 10.26905/idjch.v9i1.2168.

- Kinot, Ila Rusmiati, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan” *Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1* (April 2022):110-131. Doi: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597
- Raharja, Sam’un Jaja, “Prospek dan Tantangan Pengembangan Koperasi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian” *Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 9 No 2* (2013): 118-127. Diakses pada 17 April 2022. Doi: 10.26593/jab.v9i2.1209.%25p
- Rachmawati, Devi Erna, “Market Opportunities and Regulations Microfinance in Indonesia” *Journal of East Asian Studies No. 13*: 173-194, diakses pada 14 Agustus 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/35430822.pdf>
- Sabriel, Hilda Yunira, Ananda Amalia Tasya, Maradona dkk, “Urgensi Eksistensi Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam” *Halu Oleo Law review, Vol. 4, Issue 1*, (Maret 2020):191-205.
- Santosa, A.A. Gede D.H, “Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat” *Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 5 No. 2* (Agustus 2019):152-166. Doi: 10.23887/jkh.v5i2.18468
- Seto, Agung Anaggoro, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 2* (September 2021):145-153
- Sinuraya, Rizki Emelia, “Dialog Antara Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi dengan Modal Sosial di Koperasi Kredit Marsudi Mulyo, Putat Patuk Gunung Kidul” *Jurnal JKP Vol. 16 No.1* (Mei 2012):73-88. Diakses pada 12 April 2022. doi: 10.22146/jkap.8037
- Stephani, Jeanette, “Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Vol 1* (2013): 1-11. Diakses pada 31 Mei 2022
- Suryokumoro, Herman dan Hikmatul Ula, “Menelaah Koperasi Era Omnibus Law” *Mulawarman Law review Vol. 5 Issue 2* (2020):80-95. Diakses pada 9 Mei 2022. Doi: 10.30872/mulrev.v5i2.340
- S. S, Kusumaningtuti, “Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya dengan Deposit Protection Scheme” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1 No. 3* (Desember 1998): 151-184. Doi: 10.21098/bemp.v1i3.176
- Wijayanti, Winda, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)” *Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 1* (Maret 2013):180-204

Zubair, Muhammad Kamal, "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah" *Jurnal Iqtishadia Vol. 9 No.2* (2016):201-226

MAKALAH DALAM SEMINAR

Muzharul, Khandakar, Lila Rashid, dan Haque, "Microfinance in Bangladesh" Paper for the SAARCFINANCE Seminar on Microfinance 21-23 December 2022, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://www.bb.org.bd/saarcfinance/seminar/cpbdesb.php#:~:text=Grameen%20Bank%2C%20BRAC%2C%20ASA%20and,than%2070%25%20of%20the%20market.>

TESIS

Pane, Kamaluddin, "Pengawasan dan Penindakan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)" Tesis Master, Universitas Sumatera Utara, 2018

INTERNET

Agustiyanti, "Simpanan LKM akan Dijamin LPS Provinsi" *investor.id*, 12 Juli 2014, diakses pada 13 Agustus 2022, <https://investor.id/archive/simpanan-lkm-akan-dijamin-lps-provinsi>

Agustiyanti, "Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah Bawah" *katadata.com*, 7 Juli 2021, diakses pada 14 Agustus 2022, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60e52bd008f33/indonesia-turun-kelas-jadi-negara-berpendapatan-menengah-bawah>

Augiarto, Bernardus Ario Tejo dan Cosmos Lili Alika, "Tinjaun Historis dan Filosofis Terhadap Prinsip-Prinsip Koperasi dan Credit Union" Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. Diakses pada 16 April 2022, WIB, <https://media.neliti.com/media/publications/12697-ID-tinjauan-historis-dan-filosofis-terhadap-prinsip-prinsip-koperasi-dan-credit-uni.pdf>

Anam, Choirul "Satgas Investasi Telusuri Kasus BMT PSU Malang", *finansial.bisnis.com*, 28 Juli 2015, diakses pada 18 Agustus 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20150728/89/457044/satgas-investasi-telusuri-kasus-bmt-psu-malang->

Annur, Cindy Mutia, "Pendanaan Fintech P2P Lending Tembus Rp 40 Triliun pada Mei 2022, *databoks.katadata.co.id*, 12 Juli 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/pendanaan-fintech-p2p-lending-tembus-rp40-triliun-pada-mei-2022>

- Ardianto, Prisma, “Wow! Total Investasi Dana Pensiun Capai Rp 316,98 Triliun” *investor.id*, 2 Maret 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, <https://investor.id/finance/284819/wow-total-investasi-dana-pensiun-capai-rp-31698-triliun>
- “Empowering The Poor Through Microcredit: The Bangladesh Poverty Alleviation Project” *web.worldbank.org*, Januari 2000, diakses pada 16 Agustus 2022, <http://web.worldbank.org/archive/website00811/WEB/OTHER/450FC8A2.HTM?OpenDocument>
- “Baru 5,1 Persen, Kontribusi Koperasi pada PDB Ditargetkan 5,5 Persen pada 2024” *bisnis.tempo.co*, 10 Juli 2021. Diakses pada 28 April 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1481861/baru-51-persen-kontribusi-koperasi-pada-pdb-ditargetkan-55-persen-pada-2024/full&view=ok>
- Bangladesh Bank, “Banks & FIs” *bb.org.bd*, diakses pada 17 Agustus 2022, [https://www.bb.org.bd/en/index.php/financialactivity/bankfi#:~:text=Non%20Bank%20Financial%20Institutions%20\(FIs,one%20was%20established%20in%201981](https://www.bb.org.bd/en/index.php/financialactivity/bankfi#:~:text=Non%20Bank%20Financial%20Institutions%20(FIs,one%20was%20established%20in%201981)
- Bisnis.com, “OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Ummahat”, *financial.bisnis.com*, 3 April 2022, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220403/89/1518333/ojk-cabut-izin-usaha-koperasi-lembaga-keuangan-mikro-syariah-al-ummahat>
- “Bos BMT Meninggal, Rp17 Miliar Dana Nasabah Menguap” *jawapos.com*, 26 Januari 2017, diakses pada 18 Agustus 2022, <https://www.jawapos.com/jpg-today/26/01/2017/bos-bmt-meninggal-rp-17-miliar-dana-nasabah-menguap/>
- “Cabinet Approves Draft Law for Protection of Deposits at Financial Institutions” *thefinancialexpress.com*, 22 Februari 2022, diakses pada 17 Agustus 2022, <https://thefinancialexpress.com.bd/economy/cabinet-approves-draft-law-for-protection-of-deposits-at-financial-institutions-1645379713>
- Cahyadi, Triyan Pangastuti Aris dan Prisma Ardianto, “Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya Hancurkan Citra Koperasi, Uang Anggota Harus Segera Dikembalikan” *investor.id*, 25 Juni 2021. Diakses pada 17 Mei 2022, <https://investor.id/market-and-corporate/253016/kasus-gagal-bayar-ksp-indosurya-hancurkan-citra-koperasi-uang-anggota-harus-segera-dikembalikan>
- Converter Currency, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://wise.com/id/currency-converter/usd-to-idr-rate>
- CR-27, “Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU” *hukumonline.com*, 29 Januari 2022, diakses pada 18 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/?page=2>

- “Data UMKM” *Kemenkopukm.go.id*. Diakses pada 20 Mei 2022, <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?1YIw1XE7osqYwtjh5Yu6wS1kizWRBjKKCCOoMIly9EMfZlZPeN>
- “Deposit Insurance System in Bangladesh” diakses pada 17 Agustus 2022, <https://www.bb.org.bd/pub/annual/ditf/june2015ditf.pdf>
- Deposit Insurance Systems Worldwide*” *iadi.org*, diakses pada 18 Agustus 2022, <https://www.iadi.org/en/about-iadi/deposit-insurance-systems/dis-worldwide/#10>
- Dewi, Yunita “Profil Jepang Salah Satu Contoh Negara Maju di Dunia” *tirto.id*, 17 Februari 2022, diakses pada 18 Agustus 2022, Pukul 7:48 WIB, <https://tirto.id/profil-jepang-salah-satu-contoh-negara-maju-di-dunia-goYT>
- Dihni, Vika Azkiya, “Daftar Negara dengan Ekonomi Terbesar di Asia 2021, Indonesia Urutan Berapa?” *databook.katadata*, 6 Januari 2022. Diakses pada 12 April 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/06/daftar-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-asia-2021-indonesia-urutan-berapa>
- Direkrori LKM, “Direktori Lembaga Keuangan Mikro Desember 2021”, *ojk.go.id*, 12 April 2022, diakses pada 15 Agustus 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Pages/Direktori-Lembaga-Keuangan-Mikro-Desember-2021.aspx>
- FAT, “Bisnis LKM Wajib Stabil Agar Bisa Bentuk LPS” *hukumonline.com*, 16 Januari 2015, diakses pada 13 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bisnis-lkm-wajib-stabil-agar-bisa-bentuk-lps-lt54b8b74041629>
- Fadliansyah, Muchmmad Egi, “Temukan Fakta Baru, Kerugian Nasabah KSP Indosurya Naik jadi Rp 14 T” *katadata.com*, 6 Juni 2020. Diakses pada 25 Mei 2022, <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5edb19dc3186d/temukan-fakta-baru-kerugian-nasabah-ksp-indosurya-naik-jadi-rp-14-t>
- “Gagal Bayar, Nasabah BMT Rindu Alam Nyalindung Sukabumi Harap-Harap Cemas” *sukabimiupdate.com*, 23 Mei 2020, diakses pada 18 Agustus 2022, <https://sukabimiupdate.com/posts/69970/gagal-bayar-nasabah-bmt-rindu-alam-nyalindung-sukabumi-harapharap-cemas>
- “International Activities” *dic.go.jp*, diakses pada 18 Agustus 2022, https://www.dic.go.jp/english/e_katsudo/kokusai.html
- “Japanese Law Translation” diakses pada 18 Agustus 2022, <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3478/en>
- Jepang, Kedutaan Besar RI di Tokyo, “Jepang” *Kemlu.go.id*, diakses pada 17 Agustus 2022, <https://kemlu.go.id/tokyo/id/read/jepang/1512/etc-menu>

Komisi XI, “KSP Indosurya Gagal Bayar, Ke Mana Pengawasan OJK” 13 April 2020, diakses pada 19 Juni 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28406/t/KSP+Indosurya+Gagal+Bayar%2C+Ke+Mana+Pengawasan+OJK%3F>

Kemenkop UKM, “Data UKM”, *kemenkopukm.go.id*, diakses pada 20 Mei 2022, Pukul 10:00 WIB, <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?1YIw1XE7osqYwtjh5Yu6wS1kizWRBjKKCCOoMIly9EMfZlZPeN>

Kusnandar, Viva Buduy, “Indonesia Kini Punya 37 Provinsi, Cek Wilayah Sebarannya” *databoks.katadata.co.id*, 6 Juli 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/06/indonesia-kini-punya-37-provinsi-cek-wilayah-sebarannya>

Laws of Bangladesh, “ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০”, *bdlaws.minlaw.gov.bd*, diakses pada 17 Agustus 2022, <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-840.html?lang=en>

Lembaga Penjamin Simpanan, “Tentang Kami: F.A.Q” diakses pada 30 Mei 2022, <https://www.lps.go.id/in/web/guest/f.a.q>

Lembaga Penjamin Simpanan, “Distribusi Simpanan Bank Umum: Desember 2021” diakses pada 20 Agustus 2022, <https://www.lps.go.id/documents/10157/197446/1.+Distribusi+Simpanan+Bank+Umum+Des+2021.pdf/5d690c44-4cb7-45bd-ac1a-28c8dd421dc2>

Lembaga Penjamin Simpanan, “Distribusi Simpanan Bank Pengkreditan Rakyat: Semester II 2021” diakses pada 20 Agustus 2022, <https://www.lps.go.id/documents/10157/1268923/Data+Distribusi+Simpanan+BPR+Semester+II+2021.pdf/e825bd43-8fea-4614-9a9a-ab897fea5def>

List of Member” *iadi.org*, diakses pada 17 Agustus 2022, <https://www.iadi.org/en/about-iadi/iadi-members-and-participants/list-of-members/>

LPS, “Bank Yang Dilikuidasi” *lps.go.id*, <https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi> dan “LPS: Dampak Pandemi pada Sektor Perbankan Masih Dapat Dikendalikan”, 9 desember 2021, diakses pada 16 Agustus 2022, https://lps.go.id/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/lps-dampak-pandemi-pada-sektor-perbankan-masih-dapat-dikendalikan?

Meilanova, Denis Riantiza, “Pengumuman! OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Berkah Margo Mulyo” *financial.bisnis.com*, 12 Desember 2021, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20211212/89/1476758/pengumuman-ojk-cabut-izin-usaha-koperasi-lkm-berkah-margo-mulyo>

- Naskah Akademik RUU Perkoperasian DPR”, diakses pada 18 Mei 2022, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/9PRfQ3RrLiwr7Ef>
- Nasution, Oktaviani “APEK LKM/S di Dunia dan Financial Inclusion” diakses pada 22 Juli 2022, <https://ojs.stiesimamsyafii.ac.id/index.php/jkupsjournal/article/view/STIES%20Imam%20Asy%20Syafii%20Pekanbaru/67>
- Newswire, “OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara, Kenapa?” *sloops.com*, 31 Juli 2021, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://www.solopos.com/ojk-cabut-izin-usaha-koperasi-lembaga-keuangan-mikro-syariah-madani-emas-nusantara-kenapa-1142652>
- Nurvaningsih, Enny. “Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum di Indonesia” 19 Januari 2015, diakses pada 12 April 2022, https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_bahasa_drenny.pdf
- “Operatons of DICJ” *dicj.go.jp*, diakses pada 18 Agustus 2022, https://www.dic.go.jp/english/e_kikotoha/page_000114.html
- OJK, “Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2021” 17 Maret 2022, diakses pada 14 Agustus 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Keuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2021.aspx>
- OJK, “Statistik *Fintech Lending* Periode Desember 2021” 17 Maret 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>
- OJK, “Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro AGribisnis Gapoktan Rukun Makmur Desa Cokprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan” *ojk.go.id*, 13 Juli 2022, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Koperasi-Lembaga-Keuangan-Mikro-Agribisnis-Gapoktan-Rukun-Makmur-Desa-Coprayan-Kecamatan-Buaran-Kabup.aspx>
- Octaviano, Andrianus, “OJK Cabut Izin Dua Koperasi Lembaga Mikro” *keuangan.kontan.co.id*, 14 Juli 2022, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-dua-koperasi-lembaga-mikro>
- “Pokja Penyusunan RUU Perkoperasian Dibentuk”, 6 April 2022, diakses pada 2 Agustus 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pokja-penyusun-ruu-perkoperasian-dibentuk>

- Republik Rakyat Bangladesh, Kedutaan Besar RI di Dhaka, “Bangladesh” *Kemlu.go.id*, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://kemlu.go.id/dhaka/id/pages/bangladesh/4947/etc-menu>
- Respati, Agustinus Ranga, “Sepanjang 2021, Asuransi Jiwa Kelola Dana Rp 530,71 Triliun” *money.kompas.com*, 9 Maret 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/09/181815626/sepanjang-2021-asuransi-jiwa-kelola-dana-investasi-rp-53071-triliun>
- Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi pada 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli, 8 Juli, 18 Juli, 26 Juli, 13 September, dan 14 September, diakses pada 19 Mei 2022, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/2GLxrRq5Js7Q7Hm>
- Risalah sidang Panja Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, 17 September 2012, diakses pada 20 Agustus 2022, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YbCjdYKgZ3pmKEa>
- Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diakses pada 20 Agustus 2022, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/rJqoXgwaFKdGTBd>
- Risalah Sidang Panja Rancangan Undang-Undang No.1 Tahun 2013, 14 Juni 2012 diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 2:55 WIB, <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YbCjdYKgZ3pmKEa>
- Sagoro, Endra Murti, “Bentuk Badan Usaha”, *staffnew.uny.ac.id*. Diakses pada 19 Mei 2022, [http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+\(Bentuk+Badan+Usaha\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/198504092010121005/pendidikan/Materi+Bisnis+(Bentuk+Badan+Usaha).pdf)
- Sahbani, Agus, “UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi” *hukumonline.com*, 28 Mei 2014. Diakses pada 18 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi-lt5385bfa83b01f>
- “Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia Sejak Abad ke -19” *cnnindonesia.com*, 12 Juli 2021. Diakses pada 17 April 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210621130516-97-657212/sejarah-berdirinya-koperasi-di-indonesia-sejak-abad-ke-19>
- “Simpanan Yang Dijamin” diakses pada 13 Agustus 2022 Pukul 15:53, <https://lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin> dan <https://lps.go.id/home>
- Sidik, Syahrizal, “Dampak Covid-19, LPS Sebut Banyak BPR Diujung Tanduk” *cnbcindonesia.com*, 9 April 2020, diakses pada 16 Agustus 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200409162154-17-150956/dampak-covid-19-lps-sebut-banyak-bpr-diujung-tanduk>

Tribune Desk, “New Law to Protect People Even if Banks, NBFIs go Under” *dhakatribune.com*, 22 Februari 2022, diakses pada 17 Agustus 2022, , <https://www.dhakatribune.com/banks/2022/02/22/new-law-to-protect-people-even-if-banks-nbfis-go-under>

Triyatna, Stefanus Osa, “Koperasi Gagal Bayar Mengusik Rasa Keadilan Masyarakat” *kompas id*, 25 Januari 202. Diakses pada 17 Mei 2022, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/25/koperasi-gagal-bayar-mengusik-rasa-keadilanmasyarakat?status=sukses_login&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fekonomi%2F2022%2F01%2F25%2Fkoperasi-gagal-bayar-mengusik-rasa-keadilan-masyarakat&status_login=login

“Upaya Memperjelas Koperasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU” *hukumonline.com*, 29 Januari 2022. Diakses pada 18 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/?page=2>

UN, diakses pada 16 Agustus 2022, <http://data.un.org/en/iso/bd.html>

UN, diakses pada 17 Agustus 2022, <http://data.un.org/en/iso/jp.html>

“2020: Statistik Koperasi Simpan Pinjam”, *bps.go.id*. Diakses pada 20 Mei 2022, <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YTA5NDlmMWI2MGU1MWVlY2FjOWRIYmZl&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjEvMDcvMTkvYTA5NDlmMWI2MGU1MWVlY2FjOWRIYmZlL3N0YXRpc3Rpaylrb3BlcmFzaS1zaW1wYW4tcGluamFtLTlwMjAuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMi0wNS0yMCAxMT00MT0zNw%3D%3D>

Wijaya, Krisna, “Lembaga Penjamin Simpanan: Mencari Suatu Model” *lps.go.id*, 23 Juni 2007, diakses pada 30 Juli 2022, https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/lembaga-penjaminan-simpanan-mencari-suatu-model

Warta Ekonomi, “OJK Angkat Bicara Soal Kasus Gagal Bayar Rp 10 Triliun KSP Indosurya” *id.investing.com*, 13 April 2020, diakses pada 15 Agustus 202, <https://id.investing.com/news/economy/ojk-angkat-bicara-soal-kasus-gagal-bayar-rp10-triliun-ksp-indosurya-1975753>

Yuliawan, Agus, “LPS LKM/LKMS”, *newneraca.neraca.co.id*, 7 Desember 2021, diakses pada 20 Agustus 2022, <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/155959/lps-lkmlkms>

Yusuf, Ronald, Dessy Bonita, dan Muhammad Fajar Nugraha, “Urgensi Skema Penjaminan Manfaat pensiun di Indonesia” *fiskal.kemenkeu.go.id*, diakses pada 26 Agustus 2022, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2022/06/30/2445-urgensi-skema-penjaminan-manfaat-pensiun-di-indonesia>

Diakses pada 15 Agustus 2022, <https://www.koperasi.net/2016/03/struktur-organisasi-koperasi.html>